

OPD
TAHUN ANGGARAN

: BIRO HUKUM DAN HAM SETDA. PROVINSI BENGKULU.
: 2020


NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN	PERSENTASE	PENJELASAN
1	2	3	4	5	6	7
	<p>Sasaran Strategis :</p> <p>Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) dan Pemerintahan Yang Bersih (Clean Government)</p> <p>Program :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Program Peningkatan Administrasi Perkantoran 2. Program penataan peraturan perundang-undangan. 3. Program penanganan bantuan hukum serta pembinaan dan pengawasan HAM. 4. Program publikasi produk hukum. <p>Kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan Penyelenggaraan administrasi tata usaha, sarana dan prasarana biro hukum. 2. Kegiatan Perencanaan dan fasilitasi penyusunan peraturan daerah provinsi Bengkulu. 3. Kegiatan Pengkajian dan fasilitasi produk hukum kabupaten/kota. 4. Kegiatan Harmonisasi keputusan kepala daerah dan keputusan bersama kepala daerah. 5. Kegiatan Monitoring evaluasi PERDA dan PERKADA kabupaten/kota. 	<p>Meningkatnya jumlah administrasi perkantoran dan ketatausahaan yang dilaksanakan.</p> <p>Jumlah rancangan produk hukum daerah yang ditetapkan</p> <p>Jumlah perkara Litigasi, permasalahan hukum Non Litigas yang diselesaikan dan meningkatnya penghormatan, perlindungan, pemahaman, penegakan dan pemajuan HAM di Provinsi Bengkulu</p> <p>Jumlah Produk Hukum Daerah yang dipublikasi melalui website JDIH</p> <p>Jumlah administrasi perkantoran dan ketatausahaan yang diselesaikan.</p> <p>Jumlah Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu yang disusun dan difasilitasi</p> <p>Terbentuknya Peraturan daerah dan Peraturan Kepala daerah kabupaten/ Kota sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan</p> <p>Keputusan Gubernur yang sejalan dengan Peraturan perundang-undangan</p> <p>Laporan hasil Monitoring Evaluasi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah kabupaten/ Kota</p>				
			1.700 Surat	1.700 Surat	100	Dalam pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan administrasi tata usaha, sarana dan prasarana biro hukum. tidak ada kendala yang ditemui
			10 Dokumen	10 Dokumen	100	Pelaksanaan Pembentukan Perda untuk tahun 2020 terkendala pandemi covid-19, dimana anggaran OPD yang mengusulkan pembentukan Perda direfokuskan dan dialihkan untuk penanganan covid. sehingga OPD yang mengusulkan Perda menunda untuk tahun selanjutnya.
			75 Buah Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	75 Buah Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100	Meskipun adanya pengalihan anggaran untuk penanganan covid 19, namun kegiatan dapat tetap terlaksana dengan baik dan maksimal.
			500 keputusan Gubernur	500 keputusan Gubernur	100	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki guna menunjang kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan. 2. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki
			75 Buah Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	75 Buah Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100	Meskipun adanya pengalihan anggaran untuk penanganan covid 19, namun kegiatan dapat tetap terlaksana dengan baik dan maksimal.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAI	PERSENTASE	PENJELASAN
1	2	3	4	5	6	7
	6. Kegiatan Penyusunan program pembentukan peraturan daerah, program pembentukan peraturan gubernur dan fasilitasi peraturan gubernur Bengkulu.	Terbentuknya program pembentukan Peraturan daerah Tahun 2020 dan Program Pembentukan Peraturan Gubernur Tahun 2020	2 Program/ Dokumen	2 Program/ Dokumen	100	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam pelaksanaan kegiatan terkendala dengan anggaran yang terbatas akibat dari pandemi covid-19, dimana anggaran yang ada direfocusing dan dialihkan untuk penanganan covid-19.. 2. Kurangnya koordinasi antara instansi pemrakarsa dengan Biro Hukum dan HAM Setda. Provinsi Bengkulu
	7. Kegiatan Penyusunan dan pengkajian keputusan gubernur Bengkulu tentang evaluasi raperda kabupaten/kota.	Terlaksananya penyusunan dan pengkajian keputusan Gubernur tentang evaluasi Raperda Kab/Kota tentang APBD, APBDP, Retribusi Daerah, tata ruang, dan RPJMD Kab/ Kota se-Provinsi Bengkulu	30 Eksemplar	30 Eksemplar	100	Kurangnya koordinasi antar Kabupaten/Kota dengan Biro Hukum dan BPKD Provinsi Bengkulu
	8. Kegiatan Pembinaan dan monitoring pelaksanaan keputusan kepala daerah terkait penyelenggaraan pemerintahan di kabupaten/kota se provinsi Bengkulu.	10 laporan pelaksanaan pembinaan dan monitoring pelaksanaan Keputusan Gubernur	10 Laporan	10 Laporan	100	Belum maksimalnya laporan dari Kabupaten/Kota terkait pelaksanaan Keputusan Gubernur.
	9. Kegiatan penyelesaian sengketa hukum dan bantuan hukum kepada pemerintah daerah.	Terselesainya Pemmasalahan Hukum di Pemerintah Daerah dan dikeluarkannya Putusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum tetap	12 Perkara	12 Perkara	100	Kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki guna menunjang kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan.
	10. Kegiatan monitoring dan pelaporan penanganan perkara dan bantuan hukum kabupaten/kota di provinsi Bengkulu.	Laporan Penanganan Perkara dan bantuan Hukum Kab/ Kota di Provinsi Bengkulu	3 Laporan	3 Laporan	100	Dalam pelaksanaan Kegiatan monitoring dan pelaporan penanganan perkara dan bantuan hukum kabupaten/kota di provinsi Bengkulu tidak ada kendala yang ditemui
	11. Kegiatan penanganan permasalahan hukum non litigasi pemerintah provinsi Bengkulu.	Terlaksananya Penanganan Permasalahan Hukum non litigasi pada Pemerintah Provinsi Bengkulu	10 Kabuapter/ Kota	10 Kabuapter/ Kota	100	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki guna menunjang kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan. 2. Anggaran yang berubah-ubah membuat pelaksanaan kegiatan tidak berjalan sesuai dengan rencana 3. Kurangnya pemahaman dari Pemerintah Kabupaten/Kota terkait pentingnya kegiatan penanganan permasalahan hukum non litigasi
	12. Kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan RANHAM di provinsi Bengkulu.	Data pelaksanaan RANHAM Provinsi Bengkulu	4 Laporan	4 Laporan	100	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam Proses Pelaksanaan pengumpulan data Laporan AKSI HAM yang diperoleh dari instansi vertikal dan OPD pada Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota Se-Provinsi Bengkulu dimana data tersebut harus disampaikan ke Kantor Staf Presiden (KSP) RI/ Caturwulan, terkendala dengan banyaknya OPD dan Instansi yang tidak cepat dalam memberikan data. padahal KSP RI memberikan batas waktu, sehingga jika lewat waktu maka provinsi Bengkulu akan mendapatkan penilaian warna merah dari KSP RI

NO	SASARAN STRATEGIS	DIKATOR KINERJA	TARGET	CAP	PERSENTASE	PENJELASAN
1	2	3	4	5	6	7
						2. Walaupun ada pengalihan anggaran untuk penanganan Covid 19, tetapi kegiatan tetap dapat dilaksanakan dengan maksimal dan karena kerjasama Tim RANHAM selama 4 (empat) tahun berturut turut sejak 2017-2020, Provinsi Bengkulu berhasil memperoleh penghargaan dari materi Hukum & HAM RI sebagai Provinsi Pembina dan Pembangun Kabupaten/ Kota Peduli Hak Asasi Manusia
13.	Pembayaran hutang penyelesaian Sengketa Hukum dan Bantuan Hukum kepada Pemerintah Daerah Tahun 2019	Penyelesaian pembayaran hutang Pengacara Tahun Anggaran 2019	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100	Dalam pelaksanaan Kegiatan Pembayaran hutang penyelesaian Sengketa Hukum dan Bantuan Hukum kepada Pemerintah Daerah Tahun 2019 tidak ada kendala yang ditemui
14	Kegiatan pengelolaan sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum.	Bertambahnya jumlah data Produk Hukum Daerah Provinsi Bengkulu pada Website JDIH Pemerintah Provinsi Bengkulu	100 Produk Hukum Daerah	100 Produk Hukum Daerah	100	Dalam pelaksanaan kegiatan, ada beberapa kendala yang dihadapi yaitu : <ol style="list-style-type: none"> 1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki dalam menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan. 2. Dengan adanya Pandemi Covid-19, maka waktu dan kesempatan yang dimiliki untuk melakukan pembinaan dan monitoring terhadap pelaksanaan JDIH di Kabupaten/Kota, serta konsultasi dan koordinasi ke pusat sangat terbatas bahkan tidak memungkinkan
15	Kegiatan sosialisasi dan penyebaran produk hukum.	Meningkatnya pemahan masyarakat terhadap Hukum	20 Orang	20 Orang	90	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam Pelaksanaan kegiatan terkendala dengan adanya Pandemi Covid-19, sehingga anggaran untuk pelaksanaan kegiatan di refocusing dan difokuskan untuk penanganan Covid-19 2. Dalam Prosea pengumpulan data realisasi fisik dan keuangan yang nantinya digunakan sebagai dasar evaluasi dan monitoring terkendala dengan banyaknya OPD yang tidak rutin menyampaikan laporan

Bengkulu, 15 Februari 2021

KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM
SETDA. PROVINSI BENGKULU,


SUPRAN S.M.H.
Pembina Utama Muda